

# BAB I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Kota Batam memiliki wilayah dengan luas 3.990 km<sup>2</sup>, yang terdiri dari luas daerah perairan laut 2.950 km<sup>2</sup>, serta luas permukaan daratan sebesar 1.380,85 km<sup>2</sup>. Kota Batam memiliki lebih dari 400 pulau, dan diantaranya 329 pulau sudah memiliki nama, yang didalamnya sudah termasuk pulau-pulau terluar di wilayah perbatasan suatu negara yang mempunyai kapasitas begitu besar di dalam sektor wisatanya. Kota Batam merupakan tempat dari sekian banyak lokasi tujuan para wisatawan yang terdapat di Kepulauan Riau. Potensi Pariwisata yang terdapat di Kota Batam meliputi wisata bersejarah, wisata berbelanja, wisata beragama, wisata agrobisnis-ekowisata, wisata pameran, wisata olahraga, wisata kuliner, dan wisata bahari (Sinaga dan Dora 2022).

Salah satu fungsi dari jasa ekosistem yang bersifat budaya (*cultural*) yaitu pariwisata. Menurut BPS (2023), jumlah kunjungan wisatawan yang datang untuk berlibur ke Kota Batam pada bulan November 2023 sebanyak 100.866 jiwa. Sebagai wilayah kepulauan maka pariwisata yang berada di kota Batam didominasi dengan wisata bahari dan diantaranya dikelola sendiri oleh masyarakat. Salah satu wisata bahari yang terdapat di Kota Batam adalah Pulau Putri.

Pulau Putri merupakan pulau terluar yang masuk dalam Kecamatan Nongsa. Pulau Putri dengan luas wilayah  $\pm 50.000$  m<sup>2</sup>, banyak menyajikan pemandangan yang indah dengan pantai pasir putih dan bebatuan diantara air yang jernih dan tata letak pulau. Pulau Putri dengan wisata pantainya memiliki ekosistem pesisir yang menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Potensi ekosistem pesisir yang terdapat di Pulau Putri meliputi ekosistem lamun, ekosistem terumbu karang, dan ekosistem pantai (Mulawanti *et al.*, 2017).

Namun dengan adanya potensi yang dimiliki, Pulau Putri juga memiliki kondisi yang saat ini terancam karena keadaan terumbu karang dan kemunduran garis pantai di sekitar pulau secara perlahan yang disebabkan oleh gerusan ombak dari kapal-kapal yang melintas. Tidak jarang juga Pulau Putri mendapatkan

kiriman limbah minyak karena perairan internasional yang jaraknya dekat dari bibir pulau yaitu <1 kilometer yang membuat rusak sebagian besar Pulau Putri.

Berdasarkan kondisi diatas, peneliti ingin mengetahui jasa apa saja yang ada di Pulau Putri selain dari jasa wisata, sehingga peneliti dapat menghitung nilai jasa ekosistem yang ada. Tujuan dari peneliti mengetahui jasa ekosistem apa saja dan nilai jasa ekosistem yang ada untuk menarik para pemangku (*stakeholder*) terlibat dalam pengambilan keputusan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan jasa ekosistem agar tercipta keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan serta menjaga keberlanjutan ekosistem yang di Pulau Putri untuk masa mendatang. Maka dari itu peneliti ingin melakukan penelitian terkait "Estimasi Nilai Jasa Ekosistem Pesisir di Kota Batam studi kasus Pulau Putri".

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja jasa ekosistem pesisir yang terdapat di Pulau Putri?
2. Berapa nilai jasa ekosistem pesisir di Pulau Putri?

## 1.3. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi jasa ekosistem pesisir yang terdapat di Pulau Putri
2. Mengestimasi nilai jasa ekosistem pesisir di Pulau Putri

## 1.4. Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah:

1. Bagi Peneliti

Penelitian diharapkan bisa meningkatkan pemahaman maupun pandangan untuk peneliti terkait estimasi nilai jasa ekosistem pesisir di Kota Batam; studi kasus Pulau Putri.

2. Bagi Akademisi

Penelitian bisa dipakai untuk acuan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk membahas penelitian khususnya tentang estimasi nilai jasa ekosistem

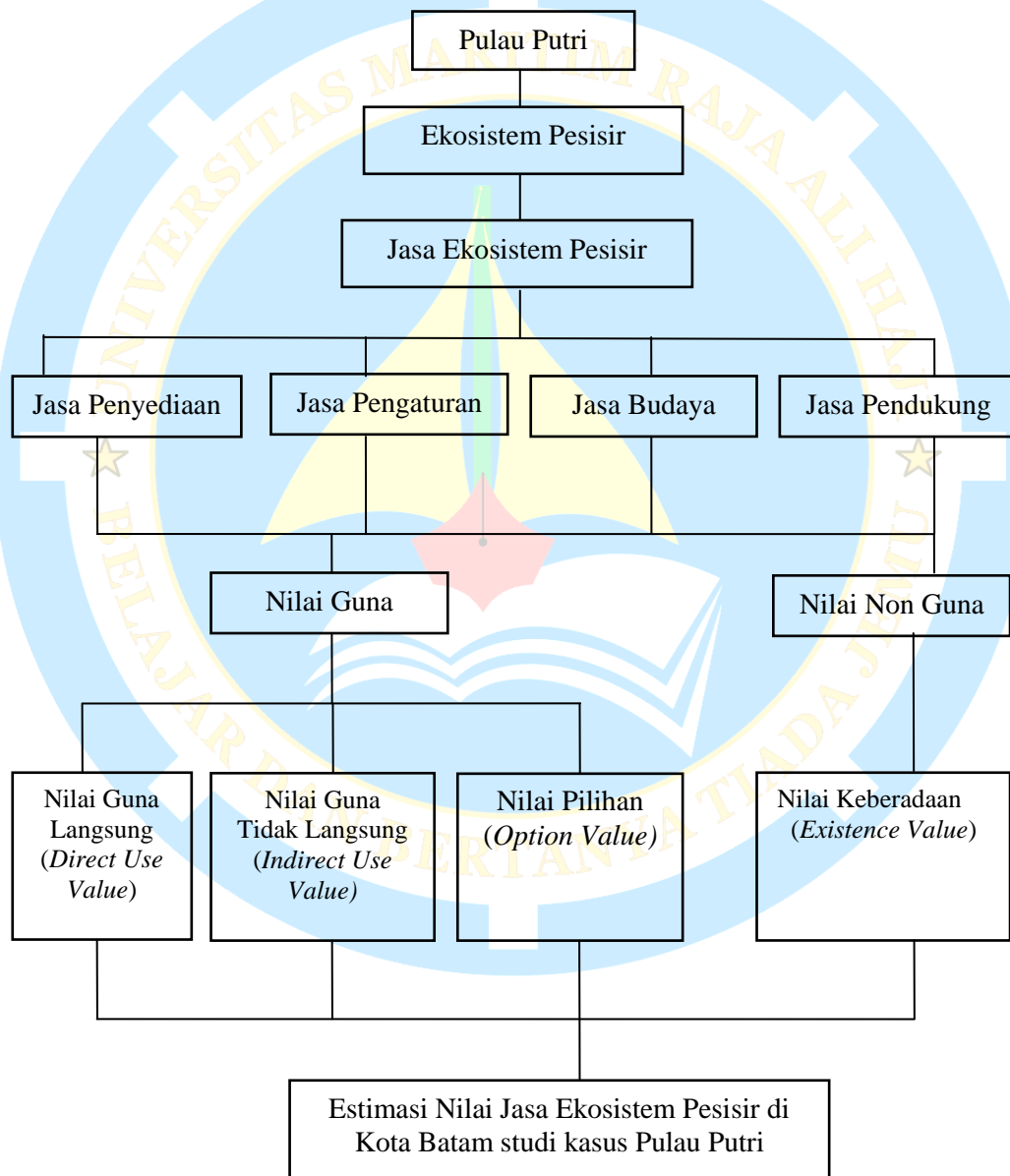
pesisir di Kota Batam studi kasus Pulau Putri.

### 3. Bagi Masyarakat

Penelitian dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk masyarakat di Pulau Putri.

### 4. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sebagai masukan atau acuan kepada pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk kedepan untuk pengelolaan pulau putri.



Gambar 1. Kerangka Pikir